

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk :

190200032

No. Panggil :

PK TIM U

Daftar ISI

- UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1971/ tentang
Pemberantasan Korupsi — 9
- PENJELASAN ATAS UU No. 3 TAHUN 1971/ tentang
Pemberantasan Korupsi — 27
- UU R.I. NOMOR 28 TAHUN 1999/ tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme — 43
- PENJELASAN ATAS UU R.I. NOMOR 28 TAHUN 1999/
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme — 59
- UU R.I. NOMOR 31 TAHUN 1999/ tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — 73
- PENJELASAN ATAS UU R.I. NOMOR 31 TAHUN 1999/
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — 96
- PERATURAN PEMERINTAH R.I. NOMOR 71 TAHUN
2000/ tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta

Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — 115

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH R.I. NOMOR 71 TAHUN 2000/ *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — 122*

UU R.I. NOMOR 20 TAHUN 2001/ *tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — 129*

PENJELASAN ATAS UU R.I. NOMOR 20 TAHUN 2001/ *tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — 149*

UU R.I. NOMOR 15 TAHUN 2002/ *tentang Tindak Pidana Pencucian Uang — 159*

PENJELASAN ATAS UU R.I. NOMOR 15 TAHUN 2002/ *tentang Tindak Pidana Pencucian Uang — 195*

UU R.I. NOMOR 30 TAHUN 2002/ *tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — 217*

PENJELASAN ATAS UU R.I. NOMOR 30 TAHUN 2002/ *tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — 261*

UU R.I. NOMOR 7 TAHUN 2006/ *tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) — 283*

PENJELASAN ATAS UU R.I. NOMOR 7 TAHUN 2006/
tentang Pengesahan United Nations Convention Against
Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti
Korupsi, 2003) — 287

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5 TAHUN 2004/ *tentang Percepatan Pemberantasan*
Korupsi — 297